

IMPLEMENTASI AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK TERHADAP PENETAPAN TARGET PENDAPATAN DI CABANG PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

Rukmi Juwita

Politeknik Pos Indonesia
witawilanggana@rocketmail.com

Riani Tanjung

Politeknik Pos Indonesia
rianitanjung85@yahoo.com

Rima Sundari

Politeknik Pos Indonesia
rimasundari@rocketmail.com

Abstract: *This research aims to study management accounting implementation in managers' decisions for setting targeting goals in service revenue of West Java province. Public sector management accounting is defined as relevant and reliable accounting information aimed at leaders with a view to planning (strategic planning, information delivery, investment assessment, budgeting, service costing, performance appraisal) and control (measuring management performance achievement by means of the achievement of targets that are in accordance with the planned program. The Vehicle Tax is the potential of substantial local taxes for revenue revenues in the western Java province. The results showed that Management Accounting has a strong relationship with Target Income Determination at West Java Provincial Income Board. Meanwhile, if seen from the result of regression equation, regression coefficient from independent variable marked positive which indicate that the implementation of good Management Accounting will increase Target Income of Regional Income Board in West Java province.*

Keywords: *Public Sector Management Accounting, Regional Income, Motor Vehicle Tax.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari implementasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan manajer dalam penetapan target pendapatan di dinas pendapatan propinsi jawa barat. Akuntansi manajemen sektor publik di artikan sebagai informasi akuntansi yang relevan dan handal yang ditujukan pada pimpinan dengan maksud untuk perencanaan (perencanaan strategik, pemberian informasi, penilaian investasi, dan penganggaran, penentuan biaya pelayanan, penilaian kinerja) dan pengendalian (mengukur pencapaian kinerja manajemen dengan cara pencapaian target yang sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan potensi pajak daerah yang cukup besar untuk penerimaan pendapatan di propinsi jawa barat. Hasil penelitian menunjukkan Akuntansi Manajemen memiliki hubungan yang kuat/erat dengan Penetapan Target Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Barat. Sedangkan jika dilihat dari hasil persamaan regresi, koefisien regresi dari variabel independen bertanda positif yang menunjukkan bahwa pelaksanaan Akuntansi Manajemen yang baik akan meningkatkan Target Pendapatan Badan Pendapatan Daerah di propinsi Jawa Barat.

Kata Kunci: Akuntansi Manajemen Sektor Publik, Pendapatan Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor.

1. PENDAHULUAN

Akuntansi manajemen adalah serangkaian tindakan dan proses akuntansi yang bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja personal yang terlibat dalam organisasi dengan menggunakan ukuran kinerja keuangan dan kinerja non keuangan. Selanjutnya akuntansi manajemen juga berguna untuk membuat strategi dan rencana jangka panjang (Prawironegoro, 2008).

Informasi yang di hasilkan dari proses akuntansi manajemen merupakan informasi yang sangat penting dalam pengambilan keputusan sebuah organisasi. Kebutuhan akan informasi akuntansi manajemen dapat mempengaruhi kondisi masa depan suatu organisasi.

Terkait dengan kebutuhan organisasi akan informasi akuntansi manajemen, sektor pelayanan publik di indonesia juga berkepentingan terhadap informasi akuntansi manajemen sebagai fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi dalam rangka pengambilan keputusan. Dalam hal ini akuntansi manajemen sektor publik di artikan sebagai informasi akuntansi yang relevan dan handal yang ditujukan pada pimpinan dengan maksud untuk perencanaan dan pengendalian (Mardiasmo, 2011).

Akuntansi sektor publik di indonesia jauh sangat ketinggalan bila di bandingkan dengan akuntansi sektor swasta (Bastian, 2010), banyak hal yang menunjukan bukti riil antara lain pemerintah indonesia belum memiliki semua infrastruktur akuntansi keuangan, standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pun baru diterapkan tahun 2015 dan sampai saat ini belum semua menggunakan standar tersebut karena ada beberapa kendala.

Hal ini pun berdampak pada pengambilan keputusan manajemen untuk organisasi yang kurang memperhatikan informasi akuntansi yang tersedia dalam lingkungan internal, karena lebih mengutamakan kebijakan yang di arahkan oleh atasan. Alat bantu yang memungkinkan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan manajerial jangka pendek adalah penggunaan akuntansi manajemen di sektor publik guna pengambilan keputusan.

Roring (2013), Martius (2012), Panjaitan (2015) dan Prastiwi (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa informasi akuntansi manajemen sangat efektif digunakan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan alternatif yang ada, namun penelitian penelitian tersebut menggunakan objek perusahaan swasta seperti perbankan dan manufaktur.

Akuntansi manajemen sektor publik mempelajari bagaimana membuat informasi akuntansi yang relevan dan handal yang ditujukan pada pimpinan dengan maksud untuk perencanaan (perencanaan strategik, pemberian informasi, penilaian investasi, dan penganggaran, penentuan biaya pelayanan, penilaian kinerja) dan pengendalian (mengukur pencapaian kinerja manajemen dengan cara pencapaian target yang sesuai dengan program yang sudah direncanakan (Sujarweni, 2015:19) Tujuan perencanaan tersebut nanti yang akan dijadikan sebagai indikator dalam penelitian implementasi akuntansi manajemen sektor publik.

Penyelenggaraan sektor publik di indonesia dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Salah satunya adalah badan

pendapatan daerah (BAPENDA). BAPENDA berkaitan langsung dengan upaya daerah menggali dan meningkatkan sumber pendapatan daerah, terutama pemasukan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak daerah (UU no 28 tahun 2009). Selain itu badan pendapatan daerah bertugas sebagai koordinator pengelolaan pendapatan daerah sehingga dapat dikatakan bahwa bapenda merupakan ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mengurus dan mengatur keuangan daerah termasuk dalam hal penetapan target pendapatan daerah.

Menurut Mardiasmo (2002), target pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal di capai dalam satu tahun anggaran. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah propinsi adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan potensi pajak daerah yang cukup besar untuk penerimaan pendapatan di propinsi jawa barat. Jumlah kendaraan bermotor di jawa barat mencatat pertumbuhan signifikan, rata rata 15%-20% per tahun. Hingga akhir desember 2015, jumlah kendaraan bermotor aktif mencapai lebih dari 14 juta unit. Dengan jumlah wajib pajak sebanyak 12 juta orang. Namun, dari jumlah tersebut hanya 80% yang patuh dan taat membayar pajak kendaraan bermotor (www.pikiranrakyat.com)).

Sementara itu Badan pendapatan daerah propinsi jawa barat pada tahun tersebut justru menurunkan target pendapatan dari pajak kendaraan bermotor sebesar 436 milyar. Ketua DPRD jabar, Ineu Purwadewi mengatakan target pendapatan jabar mengalami penurunan dari Rp.18,8 triliun menjadi Rp.18,4 triliun, penurunan target pendapatan daerah tersebut karena terjadi penurunan target pajak kendaraan bermotor yang menjadi sumber favorit pendapatan daerah. (www.antarjabar.com, 7 sept 2015).

Fauzan Azima (2015) menguraikan bahwa Faktor faktor yang menjadi penghambat terhadap proses penetapan target pendapatan asli daerah adalah: pendataan dan pendaftaran wajib pajak, pelaksanaan penagihan pajak, penertiban pemungutan pajak, pengawasan pemungutan pajak. Faktor-faktor ini lah yang akan menjadi indikator dalam mengukur target pendapatan didalam penelitian ini.

Terkait dengan penelitian tentang penetapan target pendapatan ini pernah diungkapkan oleh Rompis (2015) dan Sari (2016) mengungkapkan bahwa penetapan taraget pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD di propinsi Sulawesi utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari impelentasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan manajer untuk penetapan target pendapatan di dinas pandapatan propinsi jawa barat. Mengingat bahwa dinas pelayanan ini tersebar di kota dan kabupaten se jawa barat. Dan memberikan pelayanan publik melalui penerima pendapatan yang di peroleh dari pajak daerah berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Akuntansi manajemen sektor publik mempelajari bagaimana membuat informasi akuntansi yang relevan dan handal yang ditujukan pada pimpinan dengan maksud untuk perencanaan (perencanaan strategik, pemberian informasi biaya, penilaian investasi, dan penganggaran, penentuan biaya pelayanan, penilaian kinerja) dan pengendalian (mengukur pencapaian kinerja manajemen dengan cara pencapaian target yang sesuai dengan program yang sudah direncanakan) (Sujarweni, 2015).

Akuntansi manajemen dibutuhkan sejak tahap perencanaan strategik, manajemen organisasi membuat alternatif-alternatif program yang dapat mendukung strategik organisasi. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan biaya program (*cost of program*) dan biaya suatu aktivitas (*cost of activity*), sehingga manajer dapat menentukan anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki.

Untuk memberikan jaminan dialokasikannya sumber daya input secara ekonomis, efisien, dan efektif maka diperlukan informasi akuntansi manajemen yang akurat, relevan, dan handal untuk menghitung biaya program, aktivitas, atau proyek. Keandalan sistem informasi akuntansi manajemen sangat penting dimiliki seiring dengan adanya paradigma baru organisasi pemerintah yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat dan kepentingan publik.

Akuntansi manajemen pada sektor publik dihadapkan pada tiga permasalahan utama, yaitu efisiensi biaya, kualitas produk, dan pelayanan (*cost, quality, and service*), untuk dapat menghasilkan kualitas pelayanan publik yang tinggi dengan biaya yang murah, pemerintah harus mengadopsi sistem informasi akuntansi manajemen yang modern. Karena sebagian besar biaya yang terjadi di sektor publik merupakan *discretionary costs*, maka peran manajer publik sangat penting dalam mengendalikan biaya.

Akuntansi manajemen sektor publik memiliki peran yang strategis dalam perencanaan finansial terkait dengan identifikasi biaya – biaya yang terjadi. Juga berperan untuk memberikan informasi mengenai pengeluaran publik yang dapat digunakan oleh pihak internal (pemerintah) dan pihak eksternal (masyarakat, LSM, DPRD, universitas, dll) untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Akuntansi manajemen memainkan peran yang vital dalam proses pemilihan program, penentuan biaya program, dan penganggaran. Akuntansi manajemen membahas tentang perencanaan dan pengendalian yang sangat erat hubungannya dengan penganggaran. Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif.

Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik. Penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan merupakan satu rangkaian yang keduanya sama-sama membutuhkan

informasi akuntansi. Dengan adanya informasi akuntansi manajemen, sumber - sumber inefisiensi di organisasi dapat dideteksi dan dihilangkan.

Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci dan satuan ukur untuk masing – masing aktivitas yang dilakukan.

2.2 Target Pendapatan daerah

Menurut Mardiasmo (2011), target pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran. Agar perkiraan pendapatan daerah dapat dipertanggungjawabkan di dalam penyusunan memerlukan perhitungan terhadap faktor faktor sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut dan faktor faktor yang menghambatnya.
2. Kemungkinan pencairan jumlah tunggakan tahun tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih minimal 35% dari tunggakan sampai dengan tahun berlalu
3. Data potensi objek pajak dan estimasi perkembangan dari perkiraan penerimaan dan penetapan tahun berjalan minimal 80% dari penetapan.
4. Kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian keseragaman dan dari penyempurnaan sistem pemungutan
5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib pajak
6. Perkembangan tersedianya sarana dan prasarana serta biaya pungutan.

Berdasarkan Undang undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah propinsi adalah meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak air permukaan dan Pajak Rokok.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2013:11) menyatakan bahwa “penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih”. Dalam pelaporan hasil dari penelitian, proses penelitian, interpretasi data dan diskusi kekurangan dalam penemuan, generalisasi serta memberikan beberapa saran dan kerja penelitian yang akan dilakukan mendatang.

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Implementasi Akuntansi Manajemen, sedangkan variabel terikatnya adalah penetapan target pendapatan. Operasional variabel penelitian pada ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Operasional Variabel

Variable	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Akuntansi Manajemen Sektor Publik	Akuntansi manajemen sektor publik adalah informasi akuntansi yang relevan dan handal yang ditujukan pada pimpinan dengan maksud untuk perencanaan dan pengendalian. (mardiasmo,2011) (Sujarweni, 2015)	- perencanaan strategik - pemberian informasi biaya - penilaian investasi - penganggaran - penilaian kinerja	Ordinal
Target Pendapatan	Target pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal di capai dalam satu tahun. anggaran.(fauzan azmi,2015)	- pendataan dan pendaftaran wajib pajak. - pelaksanaan penagihan pajak - penertiban pemungutan pajak - pengawasan pemungutan pajak	Ordinal

Penelitian ini menggunakan skala likert dengan tujuan untuk memberikan informasi yang berupa nilai pada jawaban. Untuk setiap pilihan jawaban diberikan nilai/skor, maka responden harus menggambarkan, mendukung pernyataan (positif) atau tidak mendukung pernyataan (negatif).

Populasi dalam penelitian ini adalah manajer cabang pelayanan badan pendapatan daerah propinsi jawa barat tahun 2017.

Tabel 2. Populasi Penelitian

No	Kota / Kabupaten	Nama Cabang Pelayanan
1	Kota Depok	Kota Depok I Kota Depok 2
2	Kab. Bogor	Kab. Bogor
3	Kota Bogor	Kota Bogor
4	Kota Sukabumi	Kota Sukabumi
5	Kab. Sukabumi	Kab. Sukabumi I Cibadak Kab. Sukabumi II Pelabuhan Ratu
6	Kab. Cianjur	Kab. Cianjur
7	Kota Bekasi	Kota Bekasi
8	Kab. Bekasi	Kab. Bekasi
9	Kab Karawang	Kab. Karawang
10	Kab. Purwakarta	Kab. Purwakarta
11	Kab. Subang	Kab. Subang
12	Kota Cirebon	Kota Cirebon
13	Kab Cirebon	Kab Cirebon I Sumber Kab Cirebon II Ciledug
14	Kab Indramayu	Kab Indramayu I Kab Indramayu II Haur geulis
15	Kab Kuningan	Kab Kuningan
16	Kab Majalengka	Kab Majalengka
17	Kota Bandung	Kota Bandung I Pajajaran

No	Kota / Kabupaten	Nama Cabang Pelayanan
		Kota Bandung II Kawaluyaan Kota Bandung II Soekarno Hatta
18	Kab Bandung Barat	Kab Bandung Barat
19	Kab Bandung	Kab Bandung I Rancaekek Kab Bandung II Soreang
20	Kab Sumedang	Kab Sumedang
21	Kab Garut	Kab Garut
22	Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya
23	Kab Tasikmalaya	Kab Tasikmalaya
24	Kab Ciamis	Kab Ciamis
25	Kab Pangandaraan	Kab Pangandaraan
26	Kota Cimahi	Kota Cimahi
27	Kota Banjar	Kota Banjar.

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linear sederhana dengan sebelumnya diuji terlebih dahulu validitas dan reabilitas datanya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Validitas dan Realibilitas

Sebelum dianalisis, data hasil penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan realibilitasnya untuk menguji apakah alat ukur yang digunakan berapa butir item pernyataan yang telah diajukan kepada responden telah mengukur secara cermat dan tepat apa yang ingin di ukur pada penelitian. Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner benar benar dapat menjalankan fungsinya. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan korelasi rank sperman diperoleh hasil uji validitas yang menunjukkan ada 4 item yang tidak valid dan selebihnya valid dan layak digunakan sebagai alat ujur untuk penelitian dan dapat diikutkan pada analisis selanjutnya.

Selain valid, alat ukur juga harus memiliki keandalan atau realibilitas, suatu alat ukur dapat diandalkan jika alat ukur tersebut digunakan berulang kali akan memberikan hasil yang relatif sama. Untuk melihat andal tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistik, yaitu melalui koefisien reliabilitas. Apabila koefisien realibilitas lebih besar dari 0,70 maka secara keseluruhan pernyataan dinyatakan andal (reliabel). Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan metode alpha-cronbach diperoleh hasil uji reliabilitas seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian

Kuesioner	Jumlah Pertanyaan	Koefisien Reliabilitas	Keterangan
Akuntansi Manajemen sektor Publik	35	0,951	reliabel
Penetapan Target Pajak	12	0,824	reliabel

4.2 Analisis korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui kekuatan hubungan kedua variabel independen (pengaruh Implementasi Akuntansi Manajemen Sektor Publik dengan

Penetapan Target Pendapatan Daerah. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh koefisien korelasi sebagai berikut:

Tabel 4. Nilai koefisien Korelasi

			X	Y
Spearman's rho	X	Correlation Coefficient	1,000	,616**
		Sig. (2-tailed)	.	,000
		N	30	30
	Y	Correlation Coefficient	,616**	1,000
		Sig. (2-tailed)	,000	.
		N	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan nilai koefisien korelasi pada tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi antara variable X dan Y sebesar 0,616, artinya bahwa variabel Akuntansi Manajemen memiliki hubungan yang kuat/erat dan searah terhadap variable Pendapatan Daerah, berarti jika nilai variable X tinggi / naik maka nilai variable Y tinggi / naik pula.

4.3 Estimasi Model Regresi

Analisis regresi digunakan untuk menguji perubahan yang terjadi pada Pendapatan Daerah yang dapat diterangkan atau dijelaskan oleh perubahan variabel independen (Akuntansi Manajemen). Berdasarkan hasil pengolahan data Akuntansi Manajemen terhadap Penetapan Target Pendapatan daerah di peroleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.334	.483		4.835	.000
	Akmen	.511	.122	.620	4.186	.000

a. Dependent Variable: Penetapan Target Pendapatan

Berdasarkan hasil pengolahan data seperti diuraikan pada tabel 5 maka dapat dibentuk persamaan regresi variabel Akuntansi Manajemen Sektor Publik terhadap Target Pendapatan Daerah sebagai berikut.

$$Y = 2,334 + 0,511 X$$

Pada persamaan regresi diatas, dapat dilihat koefisien regresi dari variabel independen bertanda positif. Hal ini berarti bahwa bila Akuntansi Manajemen naik maka target pendapatan daerah pun akan naik pula. Persamaan di atas menunjukkan bahwa jika Y naik 1 maka X akan naik sebesar 0,511. Hal ini menegaskan bahwa

Akuntansi Manajemen yang baik akan meningkatkan Target Pendapatan daerah di Badan Pendapatan Daerah di propinsi Jawa Barat.

Selanjutnya untuk menguji apakah pengaruh Akuntansi Manajemen Sektor Publik terhadap Target Pendapatan daerah signifikan secara statistik, dilakukan uji signifikansi. Tabel 5 digunakan juga untuk menentukan taraf signifikansi atau linieritas dari regresi. Kriterianya dapat ditentukan berdasarkan uji nilai Signifikansi (Sig.). Cara yang paling mudah dengan uji Sig., dengan ketentuan, jika Nilai Sig. $< 0,05$, maka model regresi adalah linier, dan berlaku sebaliknya. Berdasarkan table di atas, diperoleh nilai Sig. = 0,000, yang berarti kriteriasignifikan ($0,05$), dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan artinya, model regresi linier memenuhi kriteria linieritas.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung variabel Akuntansi Manajemen Sektor Publik sebesar 4,186 Karena nilai t hitung (4,186) lebih besar dari t tabel (2,048) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_a , artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Implementasi Akuntansi Manajemen Sektor Publik signifikan terhadap penetapan Target Pendapatan Daerah. Hasil pengujian ini memberikan bukti empiris bahwa Implementasi Akuntansi Manajemen Sektor Publik yang baik akan meningkatkan Target Pendapatan Daerah pada Bapenda propinsi Jawa Barat.

Tabel 6. Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.620 ^a	.385	.363	.34472

a. Predictors: (Constant), X

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai R Square atau koefisien determinasi (KD) yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variable bebas dan variable terikat. Nilai KD yang diperoleh adalah 38,5% yang dapat ditafsirkan bahwa variable bebas X memiliki pengaruh kontribusi sebesar 38,5% terhadap variable Y ,dan ($100\% - 38,5\%$) lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel X.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Implementasi Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Implementasi Akuntansi Manajemen Sektor Publik diukur dengan lima dimensi yaitu Perencanaan Strategis, Pemberian Informasi Biaya, Penilaian investasi, Penganggaran dan Penilaian Kinerja. Pada pengukuran angket untuk dimensi perencanaan strategis, didapat 80,83% responden yang menjawab setuju dan sangat setuju pada BAPENDA Propinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan perencanaan strategis pada BAPENDA Propinsi Jawa Barat termasuk dalam kategori sangat kuat dan jika dilihat dari garis kontinum jumlah skor jawaban responden sebesar 942, skor tersebut masuk kedalam kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis pada BAPENDA Propinsi Jawa Barat baik.

Pada pengukuran angket untuk dimensi Pemberian Informasi Biaya, didapat 67,22% responden yang menjawab setuju dan sangat setuju pada BAPENDA Propinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan pemberian informasi biaya pada BAPENDA Propinsi Jawa Barat termasuk dalam kategori kuat. Jika dilihat dari garis kontinum jumlah skor jawaban responden sebesar 678, skor tersebut masuk kedalam kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian informasi biaya pada BAPENDA Propinsi Jawa Barat baik.

Pada pengukuran angket untuk dimensi Penilaian Investasi didapat 68,07% responden yang menjawab setuju dan sangat setuju pada BAPENDA Propinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan penilaian investasi pada BAPENDA Propinsi Jawa Barat termasuk dalam kategori kuat. Jika dilihat garis kontinum jumlah skor jawaban responden sebesar 449, skor tersebut masuk kedalam kategori sangat tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian investasi pada BAPENDA Propinsi Jawa Barat sangat baik.

Sedangkan pada pengukuran angket untuk pengukuran dimensi Penganggaran didapat 73,8% responden yang menjawab setuju dan sangat setuju pada BAPENDA Propinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan penganggaran pada BAPENDA Propinsi Jawa Barat termasuk dalam kategori kuat. Jika dilihat dari garis kontinum jumlah skor jawaban responden sebesar 694, skor tersebut masuk kedalam kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penganggaran pada BAPENDA Propinsi Jawa Barat baik.

Pada pengukuran angket untuk pengukuran penilaian kerja didapat 79,58% responden yang menjawab setuju dan sangat setuju pada BAPENDA Propinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan penilaian kerja pada BAPENDA Propinsi Jawa Barat termasuk dalam kategori sangat kuat dan jika dilihat dari garis kontinum jumlah skor jawaban responden sebesar 945, skor tersebut masuk kedalam kategori sangat tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja BAPENDA Propinsi Jawa Barat sangat baik.

4.4.2 Penetapan Target Pendapatan Daerah

Penetapan Target Pendapatan Daerah diukur dengan 4 dimensi yaitu Pendataan dan Pendaftaran wajib Pajak, Pelaksanaan Penagihan Pajak, Penertiban pemungutan Pajak, dan pengawasan pemungutan Pajak. Pengukuran angket untuk Pendataan dan Pendaftaran wajib Pajak didapat 83,85% responden yang menjawab setuju dan sangat setuju pada BAPENDA Propinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan pendataan dan pendaftaran wajib pajak pada BAPENDA Propinsi Jawa Barat termasuk dalam kategori sangat kuat. Jika dilihat garis kontinum jumlah skor jawaban responden sebesar 497, skor tersebut masuk kedalam kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendataan dan pendaftaran wajib pajak pada BAPENDA Propinsi Jawa Barat baik.

Pengukuran angket untuk Pelaksanaan Penagihan Pajak didapat 97,43% responden yang menjawab setuju dan sangat setuju pada BAPENDA Propinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan pelaksanaan penagihan pajak pada BAPENDA Propinsi Jawa Barat termasuk dalam kategori sangat kuat. Jika dilihat dari garis kontinum jumlah skor jawaban responden sebesar 550, skor tersebut masuk kedalam

kategori sangat tinggi Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak pada BAPENDA Propinsi Jawa Barat sangat baik.

Pengukuran angket untuk pelaksanaan Penertiban pemungutan Pajak didapat 90,00% responden yang menjawab setuju dan sangat setuju pada BAPENDA Propinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan pelaksanaan Penertiban pemungutan Pajak pada BAPENDA Propinsi Jawa Barat termasuk dalam kategori sangat kuat. Jika dilihat dari garis kontinum jumlah skor jawaban responden sebesar 258, skor tersebut masuk kedalam kategori sangat tinggi Sehingga dapat disimpulkan bahwa penertiban pemungutan pajak pada BAPENDA Propinsi Jawa Barat sangat baik.

Pengukuran angket untuk Pengawasan pemungutan Pajak didapat 94,97% responden yang menjawab setuju dan sangat setuju pada BAPENDA Propinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan Pengawasan pemungutan Pajak pada BAPENDA Propinsi Jawa Barat termasuk dalam kategori sangat kuat. Jika dilihat dari garis kontinum jumlah skor jawaban responden sebesar 263, skor tersebut masuk kedalam kategori sangat tinggi Sehingga dapat disimpulkan bahwa penertiban pemungutan pajak pada BAPENDA Propinsi Jawa Barat sangat baik.

4.4.3 Pengaruh Implementasi Akuntansi Manajemen Terhadap Target Pendapatan

Berdasarkan nilai koefisien korelasi pada tabel 6 dapat diketahui bahwa variabel Akuntansi Manajemen memiliki hubungan yang kuat/erat dengan Penetapan Target Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Prov Jawa Barat. Sedangkan jika dilihat dari hasil persamaan regresi, koefisien regresi dari variabel independen bertanda positif yang menunjukkan bahwa pelaksanaan Akuntansi Manajemen yang baik akan meningkatkan Target Pendapatan daerah pada Badan Pendapatan Daerah di propinsi Jawa Barat.

Berdasarkan nilai koefisien determinasi didapat hasil, Besar pengaruh Implementasi Akuntansi Manajemen terhadap Penetapan Target sebesar 38,5 persen yang sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan data keluaran software SPSS seperti disajikan pada tabel 6 diperoleh nilai thitung variabel standar akuntansi pemerintahan sebesar 4,186. Karena nilai thitung (4,186) lebih besar dari ttabel (2,069) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_a , artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Implementasi Akuntansi Manajemen Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap Penetapan Target Pendapatan di Kab/Kota Propinsi Jawa Barat.

Hasil penelitian ini sangat mendukung terhadap penelitian penelitian terdahulu yang di kemukakan oleh Roring (2013), Martius (2012), panjaitan (2015) dan prastiwi (2014) yang menyimpulkan bahwa informasi akuntansi manajemen sangat efektif digunakan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan alternatif yang ada.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa implementasi Akuntansi Manejemen Sektor Publik berpengaruh secara signifikan

terhadap penetapan target pendapatan. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Implementasi Akuntansi Manajemen yang baik akan meningkatkan Penetapan target pendapatan di kabupaten / kota di Propinsi Jawa Barat

Penelitian ini dilakukan dengan metode regresi, untuk mendukung penelitian agar lebih meyakinkan terhadap hasilnya, disarankan untuk melakukan penelitian dengan metode penelitian yang berbeda agar mendapat kapastian bahwa Implementasi akuntansi manajemen akan berpengaruh secara signifikan terhadap penetapan target pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2012. *Akuntansi Sektor Publik Teori, Konsep dan Aplikasi*, Salemba Empat, Jakarta
- Bambang Hariadi, 2002. *Akuntansi Manajemen*; Jogjakarta : BPFE.
- Charless T. Hongren dan Walter T Hongren, 2007. *Akuntansi Jilid Satu*. Edisi Tujuh. Erlangga, Jakarta.
- Darsono Prawironegoro, 2008, *Akuntansi Manajemen*, Edisi 2, Jakarta: mira wacana Media.
- Devas, Nick, dkk 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia* , jakarta UI-Press.
- Devas, Nick.,et. 1989. *Financing Local Government in Indonesia*. Ohio University Center FOR Internasional Studies Monograph in Internasional Studies, Southeast Asias Series Number 84.ohio., athena.
- Duward A.K Panjaitan, Hariyanto Subijono, 2015. Peran Informasi Akuntansi Manajemen dalam Proses Pengambilan Keputusan Jangka Panjang Mengenai Investasi Aktiva Tetap pada PT Cakra Buana Migas. *Jurnal EMBA*, Vol.3 No.2 Juni 2015.
- Fauzan Azima, 2015. Proses Penetapan Target Pendapatan Daerah Studi Kasus Penetapan Target Pajak Hotel Dan Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo. *Jurnal Artikel Program Magister Sains Ilmu Administrasi Pasca Sarjana Universitas Terbuka Jakarta* 2015.
- Gerald David Roring, 2013. Penerapan Informasi Akuntansi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan Investasi pada PT Bank Sulawesi Utara Manado. *Jurnal EMBA*. Vol.1 No. 3, September 2013.
- Indra Bastian, 2010, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Erlangga. Jogjakarta.
- Jones & Pendlebury, 2000. *Public Sector Accounting*, Tj International ltd, Padrow, Comwell, england.
- Mardiasmo, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, Andy Offset, Jogjakarta

- Martius, 2012. Analisis Praktek Akuntansi Manajemen pada Perusahaan Manufaktur. Studi Empiris di Kawasan Batam. Jurnal. artikel Program Magister Sains Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Andalas.
- Natalie Ester Rompis, Ventje Ilat, Anneke Wengkar, 2015. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sulawesi Utara, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol.15. No. 03 tahun 2015.
- Pamungkas, 2012. Pengaruh Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jurnal Ilmiah Ranggagading, Vol.12 No.2 Oktober 2012.
- Peraturan Gubernur No 13 tahun 2013 tentang Pajak Permukaan air Tanah.
- Peraturan Gubernur no 28 tahun 2012 tentang Pajak PBBKB
- Pergub no 17 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Penetapan Organisasi di Propinsi Jawa Barat.
- Ratnasari, 2016. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Progress Pembangunan, Vol.1.No.1 2016.
- Undang Undang no 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah.
- [www.pikiranrakyat .com](http://www.pikiranrakyat.com)
- www.antarjabar.com
- V.Wiratna Sujarweni, 2015. Akuntansi Sektor Publik Teori Konsep Aplikasi. Pustaka Baru Press, Jogjakarta.